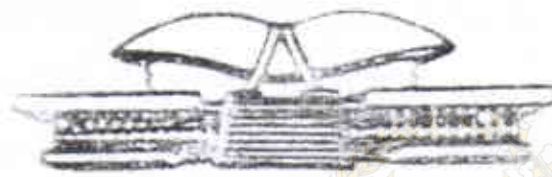




**LAPORAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2004-2005**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2005**



**LAPORAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2004 – 2005**

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2004-2005 meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI dari tanggal 16 Agustus 2004 sampai dengan 15 Agustus 2005, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis maupun administratif serta pemberian bantuan keahlian.

Sebagai unsur pendukung Dewan, Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara periodik melaporkan pelaksanaan tugasnya.

Laporan sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan serta penyempurnaan organisasi ke arah yang lebih baik, karena laporan merupakan salah satu alat pengendalian kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Tahun Sidang 2004-2005 berlangsung selama satu tahun penuh yang terbagi dalam 4 masa persidangan. Selama tahun sidang 2004-2005 telah banyak kegiatan yang dilakukan Dewan terutama dalam rangka melanjutkan proses Reformasi yang terus bergulir. Kegiatan tahun sidang ini ditandai dengan adanya pergantian periode keanggotaan Dewan hasil pemilu legislatif 2004 dimana sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, jumlah anggota DPR RI bertambah dari 500 menjadi 550 anggota. Selain itu dalam mengikuti perkembangan Dewan, Sekretariat Jenderal tidak hanya memberikan dukungan teknis dan administratif saja, tetapi juga teknis fungsional

keahlian. Oleh karena itu untuk mengakomodir dinamika perkembangan Dewan, Sekretariat Jenderal telah memperkuat fungsi legislasi dan fungsi anggaran dengan membentuk Deputy Bidang Perundang-undangan dan Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan. Dalam kaitan struktur organisasi Sekretariat Jenderal, dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 400 Tahun 2005, tanggal 3 Mei 2005, dan jika telah dilakukan pengangkatan pejabat baru sesuai peraturan Sekretaris Jenderal dimaksud, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini termasuk SK Sekjen Nomor 175 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan pasal 217 huruf f Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004, dimana Sekretariat Jenderal melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu kepada Pimpinan DPR-RI.

memfasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan, pengiriman tim kunjungan kerja, pengiriman delegasi ke berbagai forum Internasional, penerimaan dan penyaluran Delegasi masyarakat, penanganan surat-surat pengaduan maupun penyediaan data dan informasi, penyediaan bantuan keahlian, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas-tugas Dewan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dewan secara garis besar meliputi beberapa bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Dewan.

Bidang perundang-undangan merupakan salah satu fungsi utama Dewan di bidang Legislasi. Dalam kaitan fungsi pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal telah memberikan bantuan kepada Dewan dalam rangka pembahasan berbagai RUU. Untuk memperkuat dukungan terhadap tugas Dewan di bidang legislasi, Sekretariat Jenderal telah membentuk sebuah *supporting system unit* yang

husus melakukan kegiatan di bidang penyusunan Rancangan Undang-undang usul inisiatif Dewan. Dalam kaitan itu Sekretariat Jenderal telah membentuk jabatan fungsional perancang yang mempunyai tugas memberi bantuan teknis dan keahlian di bidang perancangan perundang-undangan dan jabatan fungsional perencana anggaran dan/atau analis kebijakan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan fungsi anggaran.

Sekretariat Jenderal DPR RI juga ikut serta sebagai pendamping dalam setiap pembahasan berbagai Rancangan Undang-undang. Dalam setiap pembahasan Rancangan Undang-undang, Sekretariat Jenderal telah memberikan dukungan kepada Badan Legislasi, Komisi, Panitia Anggaran, Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan antara Dewan dengan Pemerintah.

Dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2004-2005, Dewan telah menyetujui 19 RUU dimana 8 RUU diantaranya merupakan usul inisiatif Dewan. Ke

19 RUU tersebut oleh Dewan bersama Pemerintah telah disetujui menjadi undang-undang. Ke 19 RUU itu antara lain RUU tentang Lembaga Penjamin Simpanan; RUU tentang Praktik Kedokteran; RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; RUU tentang Jabatan Notaris; RUU tentang Perikanan; RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; RUU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat; RUU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; RUU tentang Wakaf; RUU tentang Perubahan APBN TA 2004; RUU tentang APBN TA. 2005; RUU tentang Jalan; RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah; RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan RUU tentang TNI.

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2004-2005 merupakan masa transisi, dari periode 1999-2004 ke DPR RI periode 2004-2009 hasil pemilihan umum tahun 2004. Dalam masa persidangan II tahun 2004-2005 Sekretariat Jenderal DPR telah memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rangka kegiatan pemilihan pimpinan Dewan periode 2004-2009, pembahasan sampai dengan pengesahan Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 2004, pembentukan dan pemilihan pimpinan Komisi-komisi, Panitia Anggaran, Bamus, BURT, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan serta penyusunan keanggotaan DPR RI pada seluruh alat kelengkapan Dewan.

Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah memberikan bantuan teknis administratif dan keahlian dalam kaitannya dengan penyusunan draft RUU sebanyak 27 RUU yang telah dibahas dan disampaikan kepada Presiden. Ke- 27 RUU itu antara

lain RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; RUU tentang Kesehatan; RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, RUU tentang Lembaga Kepresidenan, RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia; RUU tentang Asuransi Kesehatan Nasional; RUU tentang Perkreditan Perbankan; dan RUU tentang Keolahragaan.

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2004-2005, Dewan akan melakukan pembahasan terhadap berbagai rancangan undang-undang sesuai dengan prioritas RUU di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan antara Dewan dan pemerintah. Sekretariat Jenderal DPR RI telah memberikan bantuan teknis, administratif dan keahlian kepada Dewan dalam rangka penetapan

prioritas RUU. Untuk tahun anggaran 2005 ditetapkan sebanyak 55 RUU yang memerlukan penanganan oleh Komisi-Komisi Dewan ataupun Panitia Khusus yang dibentuk.

Diantara 55 RUU yang memerlukan prioritas adalah RUU tentang Lembaga Kepresidenan, RUU tentang Kementerian Negara, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU tentang Badan Penasehat Presiden, RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Penanggulangan Bencana, RUU tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial, dan RUU tentang Badan Hukum Pendidikan.

Pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2004-2005, Sekretariat Jenderal telah memberikan bantuan teknis, administratif dan keahlian kepada Dewan dalam rangka pembahasan sejumlah Rancangan Undang-undang oleh Dewan yaitu RUU

tentang Perubahan UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005. Sekretariat Jenderal telah ikut memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian 8 (delapan) draft RUU usul inisiatif yang telah disampaikan kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menugaskan menteri yang mewakili dalam pembahasan bersama dengan DPR.

Empat diantaranya RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama masing-masing di Provinsi Bangka Belitung, Maluku Utara, Banten dan Gorontalo, RUU tentang Guru dan Dosen; RUU tentang Ombudsman; RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Peradilan Agama.

Selain itu Sekretariat Jenderal DPR juga telah memberikan bantuan teknis administratif dan keahlian dalam rangka mempersiapkan pembahasan RUU dari pemerintah, yaitu RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005

tentang Penangguhan berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-undang; RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, menjadi undang-undang; RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; RUU tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana; RUU tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); RUU tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICERS* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya); dan RUU tentang Keolahragaan.

Disamping itu Sekretariat Jenderal memberikan dukungan terhadap pengajuan Rancangan Undang-undang usul Dewan dengan melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian, studi banding ke berbagai negara, mengadakan seminar-seminar, melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi/universitas, serta penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan naskah akademik RUU usul DPR RI.

Terhadap proses pembahasan RUU-RUU melalui Komisi-Komisi, maupun oleh Panitia Khusus (Pansus), Sekretariat Jenderal telah memberikan dukungan mulai dari penyiapan rapat-rapat, penyiapan data dan informasi, penyediaan bantuan tenaga ahli, penyusunan konsep kesimpulan dan notulensi rapat, penggandaan dan pendistribusian hasil-hasil rapat sampai dengan melakukan sosialisasi terhadap RUU yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan dukungan yang optimal kepada Dewan dibidang perundang-

undangan, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam struktur barunya telah membentuk suatu unit kerja yang membidangi masalah perancangan undang-undang yang dipimpin seorang Deputi Perundang-undangan. Unit kerja ini mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dibidang legislasi. Diharapkan dengan dibentuknya unit kerja yang menangani masalah perancangan perundang-undangan, dapat membantu secara optimal tugas-tugas yang dilakukan Dewan dalam bidang legislasi.

Sekretariat Jenderal juga telah membantu Dewan dalam melaksanakan tugasnya di bidang fungsi pengawasan baik melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum dan berbagai pertemuan konsultasi. Disamping itu Sekretariat Jenderal juga membantu kegiatan Dewan

dengan mengikuti Tim kunjungan kerja komisi ke beberapa propinsi dan membuat laporan yang akan dibahas dengan Departemen/Instansi terkait.

Selama satu tahun masa sidang, Sekretariat Jenderal telah memberikan bantuan kepada Dewan dalam fungsi pengawasan dengan mempersiapkan dan mengikuti Rapat Kerja sebanyak 241 kali dengan para Menteri sebagai mitra kerja/counterpart, Rapat Dengar Pendapat sebanyak 310 dan Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 208 kali.

Selain itu Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan bantuan teknis dan administratif kepada Badan Kehormatan DPR RI dengan melakukan pengumpulan rekap kehadiran anggota dari Rapat Paripurna, Komisi-komisi, Baleg, Bamus, BURT, BKSAP dan Panitia Anggaran dan membuat rekap kehadiran anggota DPR RI dengan melakukan verifikasi terhadap anggota yang 3 (tiga) kali tidak hadir secara berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa

ijin dari pimpinan Fraksi yang merupakan pelanggaran kode etik Pasal 6 ayat (2).

Dalam rangka memberikan dukungan kepada Dewan di bidang pengawasan, Sekretariat Jenderal telah pula memberikan bantuan teknis administratif dalam rangka melakukan kunjungan lapangan ke 3 Propinsi yaitu, kunjungan lapangan Panitia Anggaran Komisi II DPR ke Diklat Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; serta kunjungan lapangan pimpinan dan anggota Komisi II ke lokasi Bom Kuningan, Jakarta (setelah rapat kerja dengan Kapolri); kunjungan lapangan Komisi III ke Karawang Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Namun demikian pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2004-2005 sesuai jadwal acara, tidak ada reses yang berarti juga tidak ada kunjungan kerja, karena pada tanggal 1 Oktober 2004 pelantikan anggota DPR RI periode 2004-2009.

Kemudian pada Masa Persidangan II Sekretariat Jenderal memberikan bantuan untuk

melaksanakan, kunjungan kerja Dewan ke 23 propinsi dengan 23 Tim. Selanjutnya pada Masa Persidangan III Sekretariat Jenderal memberikan bantuan untuk melaksanakan kunjungan kerja Dewan ke 29 propinsi dengan 33 Tim. Pada Masa Persidangan IV Sekretariat Jenderal memberikan bantuan untuk melaksanakan kunjungan kerja Dewan ke 24 propinsi dengan 33 Tim. Di samping dukungan teknis administratif serta penyediaan dana, Sekretariat Jenderal juga telah memberikan dukungan staf untuk ikut serta dalam kunjungan kerja agar dapat memperlancar tugas-tugas Dewan termasuk penyusunan konsep laporan kunjungan kerja Dewan.

Dalam memfasilitasi kegiatan Dewan di bidang anggaran sebagai pelaksanaan fungsi budgeting, Sekretariat Jenderal telah memberikan bantuan dalam proses administrasi terhadap penyediaan dana yang diperlukan oleh Dewan untuk memperlancar tugas-tugas yang dilakukan oleh DPR. Sekretariat

Jenderal juga melakukan penyusunan konsep anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal berupa Rancangan Daftar Usulan Kegiatan (RDUK) yang akan digunakan oleh Pimpinan Dewan untuk menetapkan anggaran/budget Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Terkait dengan pemberian dukungan kepada Dewan dalam bidang anggaran, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam struktur barunya telah membentuk suatu unit kerja yang membidangi masalah anggaran dan pengawasan yang dipimpin oleh seorang Deputi. Tugas pokok Deputi ini adalah memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang anggaran dan pengawasan, baik yang dilaksanakan melalui Panitia Anggaran maupun Komisi-komisi.

Sekretariat Jenderal juga telah melakukan koordinasi secara intensif antar unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan dengan instansi-instansi terkait

dan telah dikoordinasikan dengan BURT serta Panitia Anggaran untuk pembahasan dan penyempurnaan rancangan anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal. Melalui Biro Perencanaan dan Pengendalian serta Biro Keuangan, Panitia Anggaran dan BURT secara terkoordinasi terus berupaya untuk dapat meningkatkan anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal agar dapat menunjang tugas-tugas Dewan dan tugas-tugas Sekretariat.

Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima pengaduan masyarakat baik berupa surat maupun delegasi masyarakat yang datang langsung untuk menyampaikan permasalahan kepada Dewan.

Pada tahun sidang ini Dewan telah menerima berbagai surat pengaduan masyarakat baik yang langsung ditujukan kepada pimpinan Dewan maupun berupa tembusan dan kepada Komisi, maupun Fraksi. Dalam penanganan surat-surat pengaduan

masyarakat, Sekretariat Jenderal telah melakukan kajian dan analisis sesuai dengan permasalahannya yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Dewan untuk dikirimkan kepada instansi/pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Surat Pengaduan masyarakat yang diterima Sekretariat Jenderal, pada Masa Persidangan I sebanyak 483 surat pengaduan, Masa Persidangan II sebanyak 873 surat, Masa Persidangan III sebanyak 982 surat, dan Masa Persidangan IV sebanyak 968 surat. Jumlah keseluruhan surat pengaduan masyarakat yang sudah dianalisis sebanyak 565 surat pengaduan, sedangkan masih terdapat 513 surat sedang dalam proses analisis.

Dari berbagai surat pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan, oleh Sekretariat Jenderal telah dianalisis dan dikelompokkan menjadi beberapa masalah. Permasalahan yang paling menonjol adalah masalah di bidang politik, ekonomi dan keuangan sebanyak 373 kasus. Urutan kedua adalah masalah

di bidang industri dan perdagangan 107 kasus, dan urutan ketiga adalah di bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 76 kasus.

Di samping melalui surat, masyarakat juga mengadukan permasalahannya ke DPR secara langsung melalui beberapa delegasi. Pada Masa Persidangan I Sekretariat Jenderal telah menyalurkan delegasi masyarakat sebanyak 70 delegasi, dan Masa Persidangan II telah menyalurkan delegasi masyarakat sebanyak 72 delegasi.

Pada Masa Persidangan III Sekretariat Jenderal telah menyalurkan 95 delegasi masyarakat dan pada Masa Persidangan IV telah menyalurkan delegasi masyarakat sebanyak 66 delegasi. Keseluruhan delegasi masyarakat yang datang untuk mengadukan permasalahannya secara langsung ke DPR pada Tahun Sidang 2004-2005 berjumlah 303 delegasi. Delegasi masyarakat yang langsung menyampaikan permasalahannya kepada Dewan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Kelompok mahasiswa,

kelompok akademisi, kelompok guru, kelompok profesi, kelompok pekerja/buruh, kelompok pedagang, kelompok ormas dan kelompok LSM-LSM lainnya.

DPR RI sebagai Sub Sistem dalam Sistem Politik Nasional diharapkan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai issue-issue internasional. Keterlibatan parlemen/DPR dalam kegiatan luar negeri terutama dalam konperensi-konperensi internasional, baik dalam lingkungan parlemen maupun di luar parlemen. Melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat kelengkapan DPR.

Pengiriman delegasi tersebut dimaksudkan dalam rangka turut serta membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai politik luar negeri. Hal tersebut dikarenakan jarak antara issue-issue dalam negeri dan issue-issue internasional sudah demikian

berkembang pesat dan cepat dalam era globalisasi yang cenderung adanya saling ketergantungan antara negara-negara di dunia.

Dalam kaitan itu Sekretariat Jenderal DPR RI telah memberikan bantuan dalam rangka menunjang hubungan luar negeri di tingkat parlemen, baik internasional, regional, maupun bilateral. Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah memfasilitasi baik dalam hal penyediaan anggaran maupun penyelesaian administrasinya serta pelaksanaan teknis penyelenggaraan berbagai pertemuan dan kunjungan ke berbagai forum internasional.

Pada Masa Persidangan I Sekretariat Jenderal telah mempersiapkan delegasi DPR RI menghadiri sidang ke 111 *Hearing Inter Parlimentary Union* (IPU) yang diselenggarakan di Jenewa-Swiss tanggal 28 September - 1 Oktober 2004 dan pengiriman delegasi DPR RI ke *Parliamentary Hearing* Sidang Majelis Umum PBB ke-59 yang berlangsung tanggal 19-20 Oktober 2004 di New York, Amerika Serikat.

Pada Masa Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI telah mempersiapkan delegasi DPR RI menghadiri *The Fifth General Assembly of the Association of Asia Parliaments for Peace (AAPP)* pada tanggal 29 Nopember- 3 Desember 2004 di Islamabad, Pakistan dan delegasi DPR RI ke Konperensi Internasional dengan tema "*Strengthening Legislatures in Response to Globalization and International Security Issues*" yang berlangsung tanggal 2-3 Desember 2004 di Manila, Piliphina.

Pada masa persidangan III, Sekretariat Jenderal mempersiapkan delegasi DPR RI ke pertemuan tahunan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* ke 13 yang diselenggarakan pada tanggal 10 – 13 Januari 2005 di Ha Long City, Provinsi Quan Ninh Vietnam. Hasil dari pertemuan tersebut adalah ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang APPF ke 14 tahun 2006. Mempersiapkan delegasi DPR RI

menghadiri pertemuan ke 4 AIPO *Fact Finding to Combat the Drug Menace* (AIPOCOM) yang diselenggarakan tanggal 9-13 Maret 2005 di Luang Prabang, di Laos dan mempersiapkan delegasi DPR dalam rangka menghadiri Sidang Council ke 7 Uni Parlemen Negara-negara Islam di Beirut.

Pada masa persidangan IV, Sekretariat Jenderal DPR RI telah memberikan bantuan teknis dan administratif serta keahlian dalam rangka penyelenggaraan seminar BKSAP DPR RI dengan tema "Posisi Indonesia dalam Menghadapi Kemungkinan Pembentukan Parlemen Regional" yang diselenggarakan tanggal 3 Mei 2005, mempersiapkan pengiriman delegasi DPR RI dalam pertemuan *Global Young Political Leader Session 2005 Future Summit*, tanggal 5-7 Mei 2005 di Melbourne, Australia, delegasi DPR RI dalam pertemuan *The AIPO Study Committee on the Possibility of Establishing an ASEAN Parliament* yang diselenggarakan tanggal 13-16 Mei 2005 di Chiang

Mai, Thailand, mengirim delegasi DPR RI dalam pertemuan *Asia Pacific Parliamentary Conference on Renewable Energy* yang diselenggarakan tanggal 4 Juni 2005 di Gifu, Jepang, mengirim delegasi DPR RI dalam pertemuan *AIPO Ad-Hoc Committee Meeting on The Study Means to Promote Cultural and Eco Tourism in The ASEAN Region and Provide Funding to These Efforts* yang diselenggarakan tanggal 20-24 Juli 2005 di Siem Reap, Kamboja serta mengirim delegasi DPR RI dalam pertemuan *The Second Meeting of AIPO Study Committee on the Possibility of Establishing an ASEAN Parliament* yang diselenggarakan tanggal 7-10 Agustus 2005 di Bangkok, Thailand.

Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah mengatur penerimaan kunjungan tamu-tamu dari parlemen luar negeri, serta berbagai tamu diplomatik dari para Duta Besar Negara Sahabat yang akan bertemu dengan Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan BKSAP.

Untuk memberikan dukungan kepada Dewan baik secara teknis, administratif maupun bantuan keahlian, Sekretariat Jenderal melalui Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) sebagai unsur penunjang kepada Dewan secara rutin mengadakan berbagai seminar dan penelitian.

Pada masa persidangan I, telah mengadakan penelitian yang dilakukan Tim Hukum tentang Budaya Hukum dan Upaya Kriminalisasi tindakan Santet dalam Rancangan KUHP dan menyelenggarakan dan memfasilitasi seminar Fraksi Reformasi tentang Peluang dan Kendala Perempuan dalam Melaksanakan Tugas Calon Legislasi.

Pada masa persidangan II, P3I melalui Tim Hukumnya melakukan penelitian lanjutan ke berbagai wilayah di Indonesia tentang Budaya Hukum dan Upaya Kriminalisasi Tindakan Santet dalam Rancangan KUHP dan memberikan bantuan analisis dan informasi kepada fraksi-fraksi DPR,

Komisi-Komisi, pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR.

Pada masa persidangan III, telah menyelenggarakan seminar Fraksi Partai Golkar tentang *Roundtable Discussion* dengan pakar kesehatan dan pendidikan dan seminar intern P3I. Pada masa persidangan IV Tim Hubungan Internasional P3I melakukan penelitian tentang TKI dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan RI dan Malaysia, penelitian Tim Politik Dalam Negeri tentang Hubungan Antara Tingkat Politik Masyarakat Kab. Indramayu Jawa Barat terhadap pemilihan langsung Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Indramayu dan melakukan seminar Fraksi Reformasi tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sejak diamandemennya UUD 1945, terjadi perubahan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang, telah menjadikan DPR mempunyai kedudukan sangat kuat

di bidang legislasi. Selain itu tugas dan wewenang DPR RI yang diamanatkan konstitusi semakin bertambah. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dukungan kepada Dewan di bidang legislasi, Sekretariat Jenderal dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan mengirimkan para pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan legislative drafting sebanyak 21 orang, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Semua itu dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam pemberian bantuan di bidang keahlian kepada Dewan. Sekretariat Jenderal juga telah memberikan bea siswa kepada pegawai-pegawai yang melanjutkan pendidikannya pada program magister (S2) sebanyak 10 orang, program sarjana (S1) sebanyak 7 orang dan program diploma (D3) sebanyak 4 orang.

Untuk meningkatkan bantuan kepada Anggota Dewan dalam memperoleh informasi, maka

Sekretariat Jenderal telah menyediakan beraneka judul buku serta referensi dari berbagai disiplin ilmu yang bisa diperoleh melalui Perpustakaan.

Sebagai salah satu upaya sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, Sekretariat Jenderal telah berupaya mengintensifkan berbagai liputan berita, baik bekerjasama dengan media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat secara langsung bisa mengetahui berbagai aktivitas Dewan baik yang ada di dalam Gedung maupun kegiatan yang dilakukan di luar Gedung DPR. Disamping itu Sekretariat Jenderal telah pula menerbitkan buletin dan majalah Parlementaria secara berkala sebagai suatu media untuk menyebarluaskan kegiatan Dewan kepada masyarakat.

Kegiatan Dewan nampaknya menarik minat masyarakat, hal ini terlihat dari semakin banyaknya animo masyarakat yang mengunjungi Gedung DPR untuk mengetahui lebih dekat baik dari kalangan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum yang

datang secara langsung ke DPR dalam rangka study tour, karyawisata maupun melakukan riset.

Dalam masa persidangan I Tahun sidang 2004/2005 Sekretariat Jenderal telah memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang ingin melakukan riset sebanyak 29 kali, melayani mahasiswa dan pelajar yang melakukan study tour sebanyak 40 kali serta kelompok masyarakat yang melakukan wisata sebanyak 1 kali. Pada masa persidangan II Sekretariat Jenderal telah memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang ingin melakukan riset sebanyak 35 kali, melayani mahasiswa dan pelajar yang melakukan study tour sebanyak 32 kali serta kelompok masyarakat yang melakukan wisata sebanyak 4 kali.

Pada masa persidangan III Tahun Sidang 2004-2005 Sekretariat Jenderal telah memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang ingin melakukan riset sebanyak 20 kali, pelayanan kepada mahasiswa dan pelajar yang ingin melakukan study

tour sebanyak 61 kali serta kelompok masyarakat yang melakukan wisata sebanyak 5 kali. Pada persidangan IV Sekretariat Jenderal telah memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang ingin melakukan riset sebanyak 26 kali, pelayanan kepada mahasiswa dan pelajar yang ingin melakukan study tour sebanyak 39 kali serta kelompok masyarakat yang melakukan wisata sebanyak 1 kali.

Sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dewan, Sekretariat Jenderal telah menyediakan sarana dan prasarana untuk memperlancar tugas-tugas Dewan baik berupa Software maupun Hardware. Penyediaan sarana dan prasarana ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan lingkungan strategis dimana Dewan dituntut agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat. Penyediaan sarana dan prasarana ini difokuskan dalam pemenuhan peralatan kantor untuk memperlancar tugas-tugas teknis dan administratif serta pemenuhan fasilitas Rumah Jabatan terutama

bertambahnya jumlah anggota legislatif sebanyak 550 yang sebelumnya hanya 500 Anggota. Dalam pemenuhan rumah jabatan bagi anggota Dewan, Sekretariat Jenderal telah membangun fasilitas rumah jabatan sebanyak 51 unit di Ulu Jami-Pos Pengumben Jakarta Barat yang telah terealisasi dengan baik. Sekretariat Jenderal juga telah membangun bungalow di Griya Sabha-Kopo Bogor sebanyak 24 unit untuk type 70 dan 4 unit untuk type 120. Pembangunan bungalow tersebut sudah berjalan dengan baik.

Penyediaan sarana dan prasarana tersebut, semuanya dilakukan agar Dewan dapat berkonsentrasi secara penuh dalam menjalankan tugas-tugasnya tanpa ada hambatan teknis yang akan mengganggu kinerja Dewan, termasuk dalam hal ini adalah peningkatan mutu pelayanan di bidang kesehatan. Sekretariat Jenderal telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah dokter dan paramedis beserta

peralatan yang diperlukan. Pelayanan Dokter dan Paramedis tidak hanya di Unit Yankes di Gedung DPR tetapi juga ada di Poliklinik Rumah Jabatan Anggota Dewan di Kalibata.

Untuk mengantisipasi era reformasi yang masih bernuansa euphoria politik, Sekretariat Jenderal telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pengamanan baik di lingkungan kompleks gedung MPR/DPR RI maupun di kompleks Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan dengan menambah personil petugas pengamanan terutama dalam menghadapi unjuk rasa yang hampir setiap hari datang ke gedung MPR/DPR RI.

Di samping itu Sekretariat Jenderal telah pula berusaha untuk menjaga keamanan para Anggota Dewan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak kepolisian agar anggota Dewan dapat menjalankan tugasnya dengan tenang. Sekretariat Jenderal telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pedoman Pengamanan Rutin di lingkungan

Komplek Gedung MPR/DPR RI dan Pedoman Pengamanan Pengunjuk Rasa di lingkungan Komplek Gedung MPR/DPR RI.

Tugas pengamanan juga dilakukan di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI di Kalibata dan Ulu Jami dengan melakukan penambahan jumlah personil petugas keamanan. Walaupun dengan jumlah personil yang terbatas, namun dengan terus menjalin koordinasi dengan pihak Kepolisian hal tersebut dapat diatasi. Selama ini pihak Kepolisian telah memberikan bantuan dengan melakukan patroli secara rutin di komplek rumah jabatan Kalibata.

Untuk meningkatkan disiplin pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI telah dilakukan sistem absensi elektrik (absensi sidik jari) yang semenjak dioperasikan sampai dengan pertengahan 2005 telah ada perubahan yang signifikan terutama terhadap tingkat kehadiran pegawai dapat dengan segera dilihat seorang pegawai berapa kali cepat masuk, telat masuk, tidak absen masuk, berapa kali ikut SKJ,

cepat pulang, telat pulang, tidak absen pulang, serta berapa kali ikut upacara.

Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan cara peningkatan penyediaan fasilitas untuk menunjang kinerja para pegawai melalui pemberian insentif dan pemberian ekstra fooding serta penyediaan fasilitas transportasi dan pemberian pakaian seragam dan pakaian batik kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pendekatan peningkatan mutu dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan baik melalui pendidikan akademis, pendidikan struktural maupun pendidikan teknis. Selain pendidikan formal graduate, Sekretariat Jenderal juga telah menugaskan beberapa pegawai untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan teknis secara bertahap, baik pelatihan yang diadakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendidikan dan pelatihan teknis tersebut meliputi bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa

Jepang, bahasa Mandarin, komputer, manajemen Sumber Daya Manusia, Legislatif Drafter, penerjemah, telaahan staf paripurna dan sebagainya.

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, untuk tahun-tahun anggaran yang akan datang fungsi LAKIP menjadi semakin penting karena setiap pengajuan anggaran dikaitkan dengan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang hendak diwujudkan.

Dalam rangka memberikan pertanggung jawaban tersebut sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), yang mengalami revisi terakhir dengan

mengacu pada pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tanggal 25 Maret 2004 dan edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. SE/31/M.PAN/12/2004 perihal Penetapan Kinerja, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaporkan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2005 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Tahun 2004 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Untuk dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mendukung tugas-tugas Dewan, Sekretariat Jenderal juga telah melakukan kegiatan penataan organisasi dengan serangkaian tindakan efisiensi dengan cara melakukan restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal agar dapat

memberikan dukungan yang maksimal kepada Dewan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan strategis.

Dalam *Supporting system* yang diformulasikan adalah jabatan Deputi. Hal tersebut diharapkan agar tiga fungsi Dewan (legislasi, pengawasan dan anggaran) dapat terlayani secara lebih fokus, sehingga dukungan terhadap tugas-tugas akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain ketiga fungsi tersebut, masih ditambah satu unsur penunjang di bidang administrasi dalam rangka menunjang penyediaan sarana-prasarana untuk mensupport ketiga fungsi tersebut. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 400/Sekjen/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka proses restrukturisasi organisasi tersebut menunggu waktu sampai pengangkatan pejabat baru sesuai Ketentuan

Penutup Pasal 308 Peraturan Sekjen Nomor 400/Sekjen/2005.

Koordinasi merupakan unsur penting dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh unit kerja baik internal maupun eksternal. Secara teoritis koordinasi memerlukan kemampuan berkomunikasi yang baik antara para pemegang jabatan.

Dari berbagai permasalahan yang diajukan oleh unit-unit kerja, ternyata masih terdapat kendala koordinasi dalam penyelesaian tugas-tugas yang terkait antar beberapa unit kerja. Maka untuk dapat mengoptimalisasikan pelayanan kepada Dewan, perlu terus diupayakan suatu koordinasi yang baik sehingga akan terjadi suatu penanganan kerja yang efektif dan harmonis antar unit kerja di Sekretariat Jenderal maupun dengan instansi lain di luar Sekretariat Jenderal DPR RI. Koordinasi antar unit kerja di Sekretariat Jenderal secara rutin telah

dilakukan, namun masih perlu penanganan lebih komprehensif untuk dapat memecahkan masalah-masalah dalam pelaksanaan tugas.

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Jenderal DPR RI. Dari beberapa unit kerja masih terdapat permasalahan mengenai sumber daya manusia dalam kualifikasi serta kemampuan untuk optimalisasi tugas dan fungsi yang harus ditangani oleh pemegang suatu jabatan. Oleh sebab itu kualitas pegawai perlu mendapatkan perhatian yang serius dan terencana baik dalam pola *recruitment*, *placement* dan *promotion*, demikian juga diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pegawai di bidang teknis maupun penguasaan materi dan perluasan wawasan.

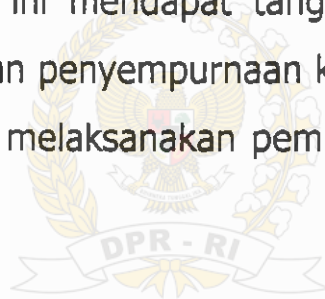
Untuk itu perlu dilakukan perubahan sikap dan mental pegawai melalui pembinaan terus-menerus dan perlu adanya keteladanan agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi serta

dinamika Dewan yang penuh dengan semangat demokratisasi.

Sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok Sekretariat Jenderal DPR-RI masih merupakan suatu permasalahan yang sering muncul dalam setiap masa persidangan. Kurangnya sarana kerja akan dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas kepada Dewan, misalnya kurangnya komputer, mesin fotocopy. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang guna memenuhi kebutuhan tersebut dalam mengoptimalisasi pemberian bantuan kepada Dewan yang tentunya harus didukung oleh dana yang memadai.

Mengenai pelaksanaan tugas di bidang teknis dan administratif maupun bantuan keahlian yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal selama Tahun Sidang 2004-2005 telah kami rangkum dalam sebuah buku lampiran yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, yang merupakan rincian kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Demikian garis besar Laporan Sekretariat Jenderal DPR-RI Tahun Sidang 2004-2005. Kami berharap semoga laporan ini mendapat tanggapan positif demi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan pemberian dukungan terhadap Dewan.



Jakarta, 29 Agustus 2005
SEKRETARIS JENDERAL,


FAISAL DJAMAL, SH, MSI
NIP. 210000607